

Performance Human Resources Of Owners Micro And Small Businesses In The Upgrading MSMEs Program, Bogor District

Warcito^a Maruf Akbar^b Hamidah^c

^{a,b,c}Universitas Negeri Jakarta

Corresponding author e-mail: warcitow@gmail.com

ARTICLE INFO

DOI: 10.32832/jm-uika.v11i2.3510

Article history:

Received:

2-10-2020

Accepted:

25-11-2020

Available online:

01-12-2020

Keywords:

HR, Up grading, MSMEs

ABSTRACT

This study aims to determine the performance of the human resources of micro and small business owners in improving MSMEs to upgrading. This study uses a qualitative descriptive approach, micro and small business owners in Bogor Regency. Respondents were chosen purposely, namely 100 micro and small business owners who participated in the Micro and Small Business Consultation Clinic in Bogor Regency. The purpose of doing entrepreneurial activities is to get profits that are used to improve the family economy. The results showed that the performance of human resources was related to the characteristics of micro and small business owners from age, education, other occupations, as well as characteristics of micro and small businesses which included types of products, business forms, business legality, and length of business. business and the number of workers. All respondents have attended new entrepreneurship training (WUB), 57% of food security extension technical guidance (PKP) and business management training (56%). This proves that increasing the capacity of business owners is very important to do both independently, government programs and corporate CSR programs for business continuity.

1. INTRODUCTION

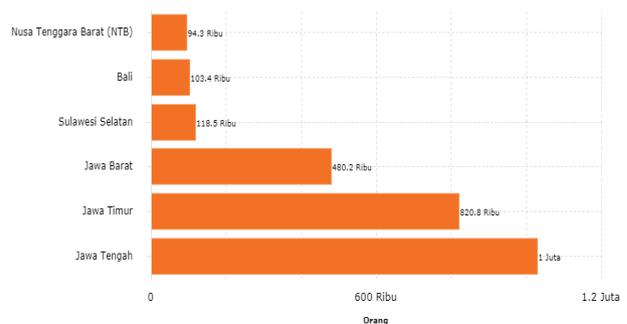
Peran sumber daya manusia (SDM) Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memegang peranan yang penting dalam pengembangan ekonomi masyarakat. Sebagai ilustrasi, data sampai dengan 2017 menunjukkan bahwa Usaha Mikro berjumlah 58,91 juta unit, usaha kecil mencapai 59.260 unit dan usaha besar hanya sejumlah 4.987 unit. Berdasarkan data tersebut maka usaha mikro dan kecil memiliki proporsi terbesar, namun kondisi usaha mikro sangat sulit naik kelas ke usaha kecil, begitu pula usaha kecil untuk dapat naik menuju kelas menengah.

Melihat peran dan peluang yang cukup besar dari UMKM, maka pemerintah terus melakukan kegiatan yang dapat mendorong UMKM dapat meningkatkan kapasitasnya sehingga target usaha mikro naik kelas menjadi usaha kecil dapat terwujud. Pemerintah melalui kementerian dan lembaga serta instansi saat ini sedang bersama-sama bersinergi untuk dapat memajukan UMKM Indonesia dengan cara meningkatkan daya saing pemilik dan kualitas produk yang dihasilkan. Kapasitas baik dari sisi kuantitatif maupun kualitatif yang akan mendorong meningkatnya jumlah usaha kecil dan menengah dan semakin sedikitnya usaha mikro artinya program pemerintah untuk menaikkelaskan UMKM berhasil dengan indikator tersebut.

Berdasarkan riset-riset yang telah dilakukan berkaitan dengan UMKM, bahwa banyak permasalahan yang membuat usaha mikro mengalami kesulitan untuk dapat naik menjadi usaha kecil begitu pula usaha kecil naik menjadi usaha menengah.

Permasalahan sebagian besar berkaitan dengan tata Kelola usaha, khususnya SDM pengelola usaha. Sebagai ilustrasi, UMKM mengalami kesulitan pada saat harus melakukan proses distribusi barang karena belum memiliki kemitraan dan keberlangsungan usaha. Hal ini tentu, dipengaruhi oleh faktor SDM pemilik maupun karyawan. Oleh karena itu, pemilik UMKM harus memiliki cara pandang yang luas dan panjang. Jika dikaitkan dengan Undang-Undang no 20 Tahun 2008 maka naik kelas berarti terjadi pemindahan skala dari usaha mikro ke kecil dan kecil menuju menengah, namun hal ini masih sangat sulit dicapai dalam waktu yang pendek karena kriteria pembedanya adalah aset, omset, dan jumlah karyawan.

Berdasarkan BPS bahwa pada tahun 2015 jumlah UMKM di Indonesia terbesar adalah di wilayah Jawa Tengah disusul Jawa Timur dan Jawa Barat. Ketiga provinsi ini dengan jumlah UMKM 3 terbesar di Indonesia memiliki pekerjaan rumah untuk dapat menggerakkan UMKM menuju ke naik kelas, sehingga program-program berkolaborasi dengan pemerintah pusat dalam hal ini adalah Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia.



Gambar 1. Provinsi dengan Jumlah UMKM terbesar di Indonesia (BPS, 2015)

Peraturan Pemerintah no 17 Tahun 2013 yang merupakan pedoman pelaksanaan Undang-Undang No. 20 tahun 2008 menegaskan bahwa pemerintah baik pusat maupun daerah harus menyelenggarakan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah yang meliputi (1) pengembangan usaha (bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, serta desain dan teknologi), (2) kemitraan, (3) perijinan, dan (4) koordinasi dan pengendalian. Kabupaten Bogor sebagai bagian dari Provinsi Jawa Barat yang merupakan provinsi dengan jumlah UMKM terbesar ke tiga di Indonesia juga memiliki program dalam rangka menaikkelaskan UMKM. Pelaksanaan program diawali dengan (a) pendataan, identifikasi potensi, dan masalah yang dihadapi; (b) penyusunan program pembinaan dan pengembangan sesuai potensi dan masalah yang dihadapi; (c) pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan; dan (d) pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program.

Pendataan awal ini menjadi penting untuk dapat menentukan langkah berikutnya, yaitu penyusunan program yang disesuaikan dengan permasalahan yang terbesar dialami oleh UMKM di kabupaten Bogor. Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor melakukan kegiatan yang diberi nama klinik konsultasi bisnis usaha mikro dan kecil (KKBUMK) dengan fokus kegiatan adalah pendampingan pemilik usaha mikro dan kecil. Pendekatan yang dikembangkan dalam pendampingan adalah pendekatan pelatihan, konsultasi dan coaching. Pelatihan dilakukan untuk membekali teknis pelaku usaha seperti manajemen pemasaran, manajemen keuangan, manajemen produksi, manajemen sumber daya

manusia, kelembagaan, dan lingkungan. Dari kegiatan tersebut, menarik untuk diteliti adalah bagaimana gambaran keragaan sumberdaya manusia pemilik usaha mikro dan kecil pada program UMKM naik kelas di kabupaten Bogor?

2. LITERATURE REVIEW

Keragaan SDM. Keragaan apabila dikaitkan dengan performance sebagai kata benda (noun), maka pengertian *performance* atau kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu perusahaan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya pencapaian tujuan perusahaan secara legal, tidak melanggar hukum dan tidak bertentangan dengan moral dan etika (Harsuko 2011).

Mangkunegara (2016) menyatakan bahwa kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai atau seseorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Pendapat lain yang dijelaskan oleh Irham (2014) menyatakan bahwa kinerja adalah hasil yang di peroleh oleh suatu organisasi baik organisasi tersebut bersifat profit oriented dan non profit oriented yang dihasilkan selama satu periode waktu. Maka dari definisi-definisi para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja atau keragaan adalah hasil kerja yang dicapai individu atau pemilik usaha sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab yang

diberikan oleh organisasi dalam upaya mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi.

Kinerja merupakan ukuran keberhasilan sebuah entitas usaha dalam mencapai tujuannya. Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen dan memberikan kontribusi pada ekonomi. Dengan demikian, kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan, hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut dan tentang apa yang dikerjakan serta bagaimana cara mengerjakannya

Kompetensi SDM. Kompetensi SDM merupakan salah satu faktor yang juga mempengaruhi kinerja UMKM. Faktor SDM menjadi modal utama untuk membuat UMKM menjadi lebih profesional. Hal ini dikarenakan sebuah unit bisnis ditentukan oleh bagaimana individu-individu yang terlibat di dalamnya mengelola bisnis tersebut. Kinerja UMKM harus disertai dengan pengembangan usahanya, namun demikian pengembangan UMKM harus disertai dengan pengembangan SDM dalam berbagai aspek. Kualitas SDM diperlukan terutama di bidang kompetensi SDM seperti knowledge, skill, dan ability dalam berwirausaha (Ardiana, et al, 2010).

Kompetensi sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang berpengaruh pada kinerja UMKM. Hal ini dikarenakan sebuah unit usaha ditentukan oleh bagaimana individu-

individu yang terlibat didalamnya mengelola usaha tersebut (Wahyudiati & Isroah, 2018). Fibriyani & Mufidah (2018) dalam penelitiannya menemukan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif pada kinerja UMKM. Semakin baik kompetensi sumber daya manusia maka semakin meningkat pula kinerja UMKM tersebut. Namun hasil berbeda yang ditemukan dalam penelitian (Ardiana et al., 2010) bahwa pengetahuan sumber daya manusia UKM tidak berpengaruh pada kinerja UMKM.

3. RESEARCH METHODS

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yang didukung oleh data kualitatif. Metode survei dilaksanakan dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data kuantitatif. Adapun data kualitatif diperoleh melalui teknik wawancara terstruktur dan *Focus Group Discussion* (FGD). Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Bogor dengan waktu pelaksanaan bulan Juli-Oktober 2019.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan dalam tiga tahap, yaitu (1) pengumpulan data tentang jumlah UMKM, jenis UMKM, dan data-data lainnya, yang berkaitan dengan UMKM di lokasi penelitian. Pengumpulan data pada tahap ini bertujuan untuk melakukan pemetaan dan pengelompokan jenis UMKM di lokasi penelitian tersebut, (2) pengumpulan data berupa skala usaha, jumlah

tenaga kerja, omzet tahunan, aset bersih, dan data-data lainnya, yang berkaitan dengan keberhasilan usaha UMKM bersangkutan. Data tersebut diperoleh dari metode survei dengan menggunakan kuesioner yang didukung oleh teknik wawancara terstruktur pada seluruh pemilik usaha di lokasi penelitian berdasarkan data yang diperoleh pada tahap pertama, dan (3) menindaklanjuti kegiatan pada tahap kedua dengan melakukan pengumpulan data melalui *Focus Group Discussion* (FGD) pada pemilik usaha terpilih berdasarkan pengelompokan dan keberhasilan usaha di lokasi penelitian.

Pengumpulan data melalui FGD bertujuan untuk memperoleh deskripsi tentang aspek-aspek yang diperlukan UMKM dalam pengembangan usaha. Berdasarkan deskripsi tersebut diharapkan tersusun rumusan saran dan rekomendasi pengembangan UMKM. Adapun responden pada tahap ketiga dipilih secara purposive berdasarkan keterwakilan pengelompokan dan keberhasilan usaha UMKM di lokasi penelitian. Informan pada penelitian ini terdiri dari pemilik UMKM terpilih berkenaan dengan program UMKM naik kelas di lokasi penelitian tersebut. Data kuantitatif dianalisis secara statistik deskriptif yang disajikan dengan tabel atau grafik frekuensi dan tipologi pengembangan bisnis UMKM berdasarkan keberhasilan usaha dan kebutuhan.

4. RESULTS

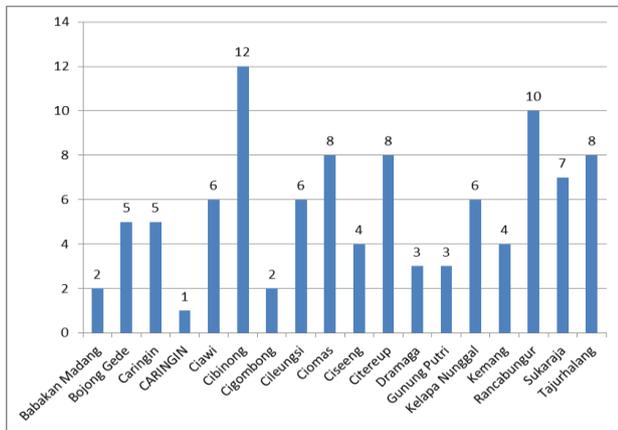
The Pada penelitian ini, keragaan sumberdaya manusia pemilik UMK di Kabupaten Bogor, dijelaskan dengan karakteristik pribadi dan karakteristik usaha, pelatihan yang diikuti dalam program UMKM naik kelas, dan omset. Karakteristik umum pemilik usaha di Kabupaten Bogor dibagi menjadi dua kelompok karakteristik, yaitu karakteristik pribadi dan karakteristik usaha. Karakteristik pribadi meliputi jenis kelamin, usia, pendidikan, dan pekerjaan, sedangkan karakteristik usaha dapat dijelaskan dengan identitas usahanya, meliputi jenis produk, bentuk usaha, legalitas usaha, lama menjalankan usaha dan jumlah tenaga kerja.

Karakteristik Umum Pemilik usaha mikro dan kecil

Karakteristik umum pemilik usaha di Kabupaten Bogor dibagi menjadi dua kelompok karakteristik, yaitu karakteristik pribadi dan karakteristik usaha. Karakteristik pribadi meliputi jenis kelamin, usia, pendidikan, dan pekerjaan, sedangkan karakteristik usaha dapat dijelaskan dengan identitas usahanya, meliputi jenis produk, bentuk usaha, legalitas usaha, lama menjalankan usaha dan jumlah tenaga kerja.

Pemilik UMKM di Kabupaten Bogor yang menjadi responden diperoleh dari 17 wilayah kecamatan dengan jumlah 100 pemilik UMKM. Adapun sebaran lokasi para pemilik UMKM

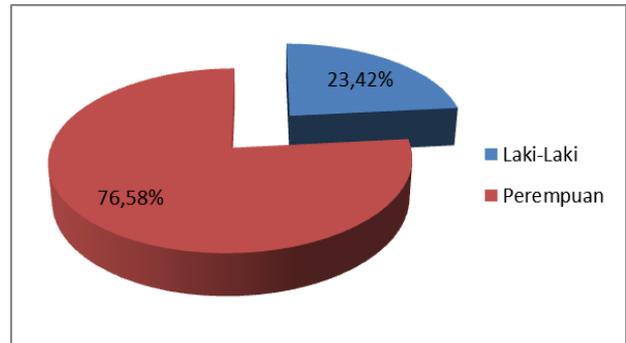
melakukan kegiatan usahanya dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Sebaran Pemilik UMKM Menurut Lokasi (dalam Persen)

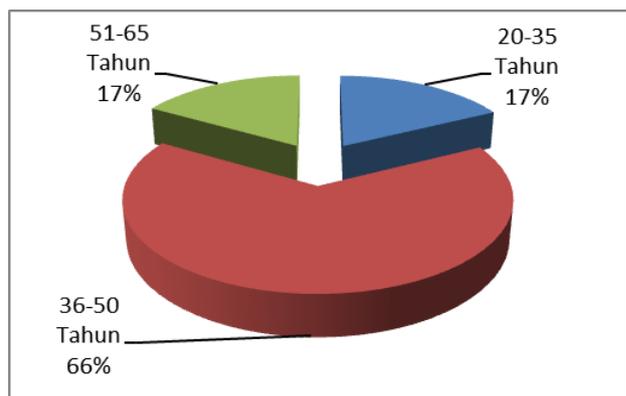
Karakteristik Pribadi Pemilik Usaha di Kabupaten Bogor

Berdasarkan hasil wawancara terhadap pemilik usaha yang tersebar di 17 kecamatan wilayah Kabupaten Bogor dapat dijelaskan bahwa dilihat dari jenis kelamin sebanyak 23,42 persen para pemilik usaha adalah laki-laki dan 76,58 persen perempuan yang dapat dilihat pada Gambar 2. Pemilik usaha yang didominasi oleh perempuan menunjukkan bahwa peranan perempuan dalam rumah tangga tidak hanya sebagai ibu rumah tangga, namun berperan dalam membantu penyediaan keuangan keluarga sehingga dapat membantu peningkatan perekonomiannya melalui keterampilan yang dimiliki untuk melakukan kegiatan usaha.



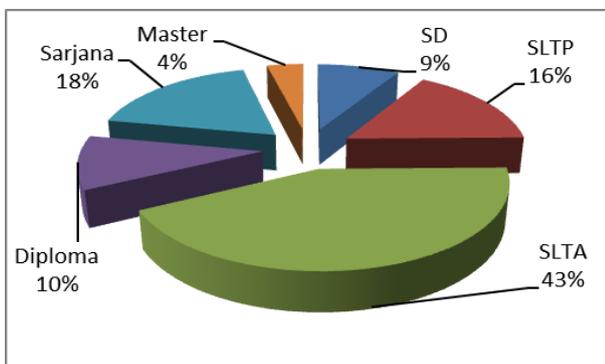
Gambar 2. Sebaran Pemilik Usaha menurut Jenis Kelamin

Dilihat dari sisi usia, sebagian besar pemilik usaha di Kabupaten Bogor berusia pada rentang usia 36-50 tahun yaitu sebesar 66 persen, sedangkan pemilik usaha yang berusia muda (20-35 tahun) yang mana sama jumlahnya dengan pemilik usaha dengan usia tua (51-65 tahun), yaitu masing-masing sebesar 17 persen. Sebaran pemilik usaha berdasarkan usia dapat dilihat pada Gambar 3. Usia pada rentang 36-50 tahun dapat dikategorikan sebagai usia yang matang untuk memulai kegiatan berwirausaha untuk meningkatkan taraf perekonomian keluarga dengan terlebih dahulu mempelajari kondisi bisnis yang akan dijalankan.



Gambar 3. Sebaran Pemilik UMKM menurut Usia

Pendidikan merupakan hal penting yang harus dimiliki oleh para wirausaha, hal ini akan mempengaruhi bagaimana para pemilik mampu mengelola usahanya dengan baik. Sebaran pemilik usaha di Kabupaten Bogor menurut pendidikan terakhir yang diperoleh dapat dilihat pada Gambar 4. Berdasarkan pendidikan terakhir dapat dilihat bahwa para pemilik usaha di Kabupaten Bogor memiliki pendidikan yang cukup tinggi dengan sebaran lulusan SLTA sebesar 43 persen, serta lulusan perguruan tinggi (diploma, sarjana dan master) sebesar 32 persen. Pendidikan yang dimiliki oleh pemilik usaha menjadi modal dasar untuk dapat mengelola usaha dengan baik sehingga dapat bertahan dalam menghadapi persaingan bisnis dengan pemilik lainnya.

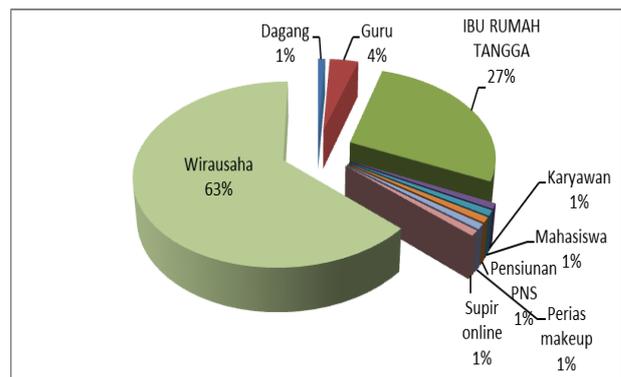


Gambar 4. Sebaran Pemilik Usaha menurut Pendidikan

Tujuan melakukan kegiatan berwirausaha adalah untuk mendapatkan keuntungan yang digunakan untuk meningkatkan perekonomian keluarga. Beberapa pemilik usaha disamping menjalankan bisnisnya, memungkinkan memiliki pekerjaan lain diluar kegiatan berwirausaha,

sehingga hal ini dapat menunjukkan status kegiatan berwirausaha apakah sebagai pekerjaan utama atau pekerjaan sampingan. Berdasarkan data sebaran pemilik usaha di Kabupaten Bogor menurut pekerjaan lainnya yang dimiliki pada Gambar 5, dapat dilihat bahwa secara umum para pemilik usaha (sebesar 63%) menyatakan kegiatan berwirausaha sebagai pekerjaan utama sehingga tidak memiliki pekerjaan lain.

Apabila dihubungkan dengan sebaran pemilik usaha menurut jenis kelamin yang didominasi oleh wanita, dapat dilihat bahwa umumnya merupakan ibu rumah tangga sebesar 27 persen. Hanya sebagian kecil yang beranggapan berwirausaha sebagai kegiatan sampingan, yakni bagi pemilik UMKM yang memiliki pekerjaan sebagai Guru, PNS dan karyawan swasta.



Gambar 5. Sebaran Pemilik UMKM menurut Pekerjaan Lainnya

Karakteristik Usaha Pemilik UMKM di Kabupaten Bogor

Penentuan UMKM pemilik usaha dilakukan

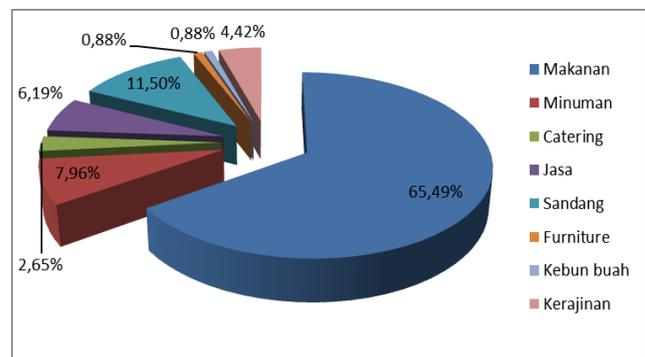
dengan memperhatikan UU No 20 Tahun 2008 mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Kegiatan usaha mikro dan kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Sedangkan usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar.

Kegiatan usaha dikategorikan ke dalam skala usaha kecil jika memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,- sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000 sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,-. Sedangkan kategori usaha skala menengah jika memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,- sampai paling banyak Rp 10.000.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,- sampai dengan paling banyak Rp

50.000.000.000,-.

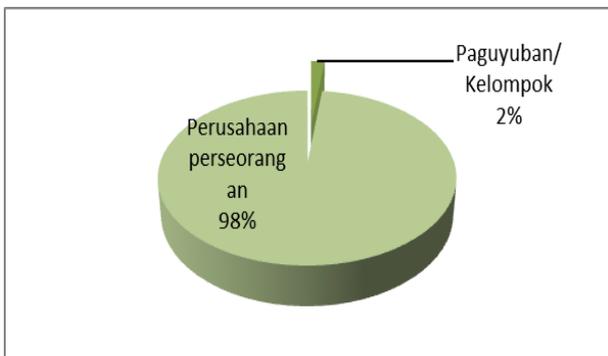
Produk yang diusahakan oleh para pemilik UMKM di Kabupaten Bogor dapat dikelompokkan menjadi barang dan jasa baik untuk produk pangan maupun non pangan. Secara umum sebesar 65,49 persen jenis produk makanan merupakan jenis produk yang banyak dihasilkan. Ragam produk makanan yang diproduksi bervariasi dari makanan ringan seperti kripik, kerupuk dan kue (basah maupun kering) sampai makanan berat seperti paket nasi. Sedangkan untuk jenis produk non pangan yang paling banyak diusahakan adalah produk sandang sebesar 11,50 persen dan kerajinan sebesar 4,42 persen. Sebaran pemilik UMKM menurut jenis produk yang dihasilkan dapat dilihat pada Gambar 6.

Variasi jenis produk yang diusahakan oleh para pemilik UMKM pada umumnya didasarkan pada perkembangan trend yang ada, sehingga pemilik UMKM selalu menonjolkan sisi kreatif dalam menciptakan produknya. Inovasi produk diperlukan dalam upaya mempertahankan bisnis dalam menghadapi persaingan.



Gambar 6. Sebaran Pemilik UMKM menurut Jenis Produk

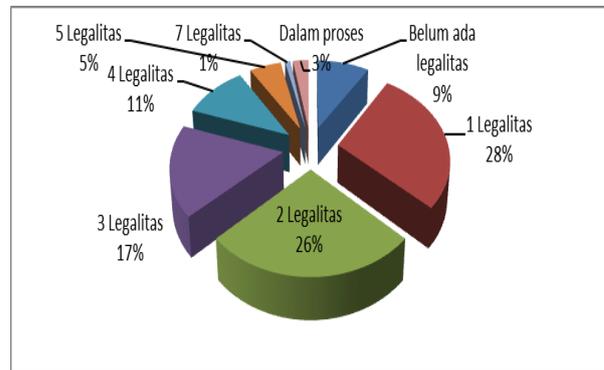
Bentuk usaha yang dimiliki oleh para pemilik UMKM di Kabupaten Bogor secara umum berbentuk perusahaan perseorangan sebesar 98 persen (Gambar 7), karena kepemilikan usaha bersifat individu. Selebihnya bentuk usaha merupakan usaha kelompok atau paguyuban yang dikelola secara bersama oleh para anggota. Bentuk perusahaan perseorangan banyak dipilih karena skala usaha yang dilakukan oleh pemilik yang masih mikro sehingga manajemen usaha yang dilakukan sangat sederhana. Adapun usaha kelompok terbentuk dari adanya perkumpulan ibu rumah tangga atau PKK yang berinisiatif untuk menghasilkan produk secara komersil dalam rangka memberikan peningkatan pendapatan bagi rumah tangganya.



Gambar 7. Sebaran Pemilik UMKM menurut Bentuk Usaha

Berdasarkan kepemilikan legalitas usaha yang dapat dilihat pada Gambar 8, menunjukkan bahwa para pemilik UMKM di Kabupaten Bogor telah menyadari pentingnya memiliki perijinan baik yang terkait dengan usaha maupun

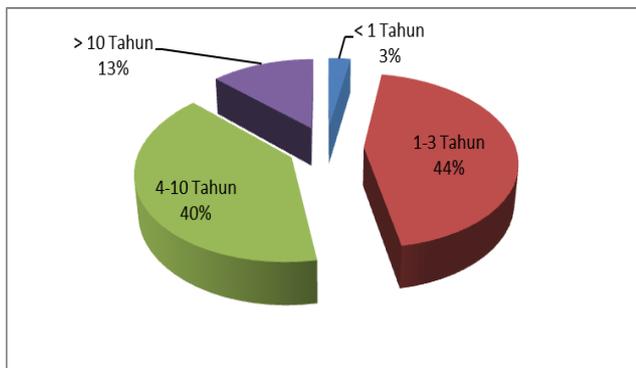
produknya dalam menjamin kesuksesan aktivitas usaha. Jika melihat kembali variasi jenis produk yang dihasilkan terbesar, yaitu makanan dan minuman, maka untuk menjamin keamanan pangan bagi konsumen maka perijinan dalam bentuk PIRT, sertikat halal mutlak untuk diperoleh. Jumlah perijinan yang sudah dimiliki bervariasi, namun secara umum sebesar 28 persen pemilik UMKM memiliki satu jenis perijinan, yaitu IUMK yang dikeluarkan oleh kecamatan. Perijinan lainnya seperti SKU, PIRT, SIUP, sertifikat Halal dan lainnya.



Gambar 8. Sebaran Pemilik UMKM menurut Kepemilikan Legalitas Usaha

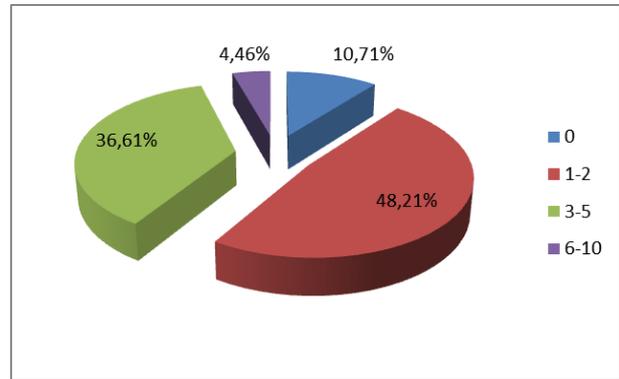
Usaha yang dijalankan oleh para pemilik UMKM di Kabupaten Bogor secara umum sudah dilakukan dalam waktu yang lama. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 9 yang menunjukkan bahwa sebesar 53 persen usaha telah dijalankan diatas 3 tahun, 44 persen telah dijalankan selama 1-3 tahun, sisanya merupakan usaha yang baru dijalankan. Dalam rangka UMKM naik kelas akan dilihat sejauh mana kemampuan pemilik

UMKM dapat meningkatkan omzetnya yang merupakan salah satu indikator yang akan dilihat. Pemilik UMKM yang telah lama menjalankan usahanya seharusnya memiliki kesempatan lebih besar untuk naik kelas karena telah memiliki pengalaman usaha yang lebih lama.



Gambar 9. Sebaran Pemilik UMKM menurut Lama Menjalankan Usaha

Jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan para pemilik UMKM bervariasi dalam rangka memperlancar kegiatan usaha yang dilakukan. Tenaga kerja yang dipekerjakan umumnya membantu dalam proses produksi, sementara untuk kegiatan pemasaran dan pencatatan keuangan dilakukan oleh pemilik UMKM. Berdasarkan Gambar 11 dapat dilihat bahwa secara umum pemilik UMKM memiliki tenaga kerja dengan jumlah 1-5 orang sebesar 84,82 persen. Sementara yang telah memiliki tenaga kerja lebih dari 5 orang sebesar 4,46 persen dan sisanya 10,71 persen tidak memiliki tenaga kerja.



Gambar 11. Sebaran Pemilik UMKM menurut Jumlah Tenaga Kerja

Pelatihan yang diikuti dalam program UMKM Naik Kelas

Dari hasil wawancara dan FGD dengan pemilik UMKM, diperoleh bahwa kemampuan mengelola usaha harus dibarengi dengan peningkatan kapasitas SDM pemilik usaha. Hal ini sejalan dengan penelitian Wulandari (2019), menyatakan bahwa melalui pelatihan pelaku usaha dapat meningkatkan hasil kinerja UMKM, dengan mengikuti pelatihan seseorang akan semakin terampil, mudah dan cepat mengambil keputusan, dan mampu menyelesaikan pekerjaan sehingga akan menghasilkan output yang memuaskan. Hasil penelitian ini didukung hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Yu (2013) dan Rosli & Mahmood (2013).

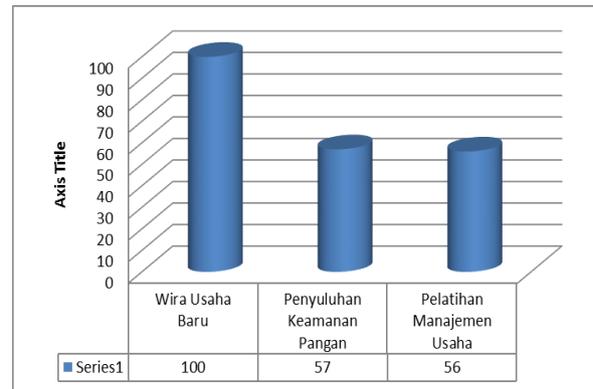
Sementara konsep *upgrading* (naik kelas) memiliki empat tipe, yaitu *upgrading* produk, *upgrading* proses, *upgrading* fungsi, dan *upgrading intersectional*. Reeg (2013) mendefinisikan *upgrading* sebagai pertumbuhan UKM melalui proses inovasi. Reeg mengidentifikasi lima jalur inovasi yang dapat terjadi pada

produk, proses, pemasaran, fungsional, dan sektor. Jalur inovasi ini terletak pada kemampuan sumber daya manusia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bidang pemberdayaan usaha mikro (PUM) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bogor menyatakan bahwa pelatihan yang diselenggarakan dalam rangka UMKM naik kelas, meliputi pelatihan dasar seperti pelatihan wirausaha baru. Pelatihan dasar ini menjadi prasyarat para pemilik usaha dapat mengikuti program UMKM naik kelas. Setelah mengikuti pelatihan dasar, peserta program dapat mengikuti Penyuluhan Ketahanan Pangan (PKP) dan pelatihan manajerial. PKP meliputi aspek keamanan, kehalalan dan higienitas pangan, sedangkan pelatihan manajerial meliputi pelatihan manajemen pemasaran, manajemen keuangan sederhana, manajemen SDM dan kelayakan usaha.

Peserta program UMKM naik kelas telah mengikuti pelatihan wirausaha baru (WUB), bimbingan teknis penyuluhan ketahanan pangan (PKP) 57% dan pelatihan manajemen usaha (56%). Hal ini membuktikan bahwa peningkatan kapasitas pemilik usaha sangat penting dilakukan baik secara swadaya, program pemerintah maupun program CSR perusahaan untuk kelangsungan usaha. Hal ini senada dengan hasil penelitian Sehabudin, dkk (2015) menyatakan bahwa penumbuhan UMK di-

pengaruhi oleh motivasi, pengalaman usaha, manfaat bagi masyarakat, pemilikan asset, akses bahan baku, pemupukan modal, jaringan pemasaran dan penciptaan wirausaha baru. Selain itu, pengembangan UMK diperlukan program pendampingan dan pelatihan bagi pelaku usaha UMK dalam mengakses teknologi informasi, pasar dan pembiayaan. Prosentase pelatihan yang pernah diikuti oleh peserta program UMKM naik kelas dapat dilihat pada Gambar 12.



Gambar 12. Prosentase pelatihan yang pernah diikuti oleh peserta program UMKM naik kelas

5. CONCLUSION AND SUGGESTION

Keragaan sumber daya manusia pemilik usaha mikro dan kecil dalam program UMKM naik kelas dapat diukur melalui keaktifan dalam mengikuti pelatihan, kelengkapan dari perijinan, tenaga kerja yang terlibat dalam usaha dan diversifikasi produk. Keaktifan dalam mengikuti pelatihan wirausaha baru dapat meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja dalam berwirausaha. Kelengkapan perijinan diperoleh

dari hasil penyuluhan ketahanan pangan (PKP) dengan diperolehnya legalitas ijin edar produk, PIRT dan fasilitasi perolehan sertifikasi halal untuk produk makanan dan minuman. Pelatihan manajemen usaha yang diikuti 56% peserta program UMKM naik kelas dapat meningkatkan pengelolaan tenaga kerja dan diversifikasi produk. Program UMKM naik kelas diawali dari proses rekrutmen peserta klinik konsultasi bisnis usaha mikro dan kecil. Peserta klinik diperoleh dari alumni peserta wirausaha baru (WUB). Ada tiga kriteria peserta yang dapat mengikuti pelatihan ini, yaitu: 1) Ide bisnis (0 tahun), 2) Startup/Pemula (1-2 tahun), 3) Growth/Pengembangan (3-5 tahun). Selain itu, calon peserta WUB harus menuliskan proposal usaha sebagai rencana usaha pengembangan. Tahapan pemberdayaan usaha mikro naik kelas dimulai dari keikutsertaan dalam pelatihan WUB, mengikuti Klinik konsultasi bisnis usaha mikro dan kecil, pelatihan kompetensi hasil rekomendasi klinik dan pelatihan kelayakan usaha dan perencanaan pengembangan usaha.

REFERENCES

- Ardiana, I. D. K. R., Brahmayanti, I. A., & Subaedi. (2010). Kompetensi SDM UKM dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja UKM di Surabaya. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 12(1), 42–55. Retrieved from <https://doi.org/10.9744/jmk.12.1.pp.42-55>
- [BPS] Badan Pusat Statistik. (2015). Jumlah Usaha Mikro Kecil Tahun 2010-2014 di Indonesia. Jakarta (ID).
- Dharmayantie E, Fauzan R. (2017). Penguatan Karakteristik dan Kompetensi Kewirausahaan Untuk Meningkatkan Kinerja UMKM. *Jurnal Manajemen, Strategi Bisnis dan Kewirausahaan*. 11 (1): 80-91.
- Fahmi, Irham. 2014. *Perilaku Organisasi*. Alfabeta. Bandung
- Fibriyani, V., & Mufidah, E. (2018). Pengaruh Faktor Eksternal dan Internal Terhadap Kinerja Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kota Pasuruan. In *Conference on Innovation and Application of Science and Technology* (pp. 148–157). Retrieved from <http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/ciastech/article/view/618>
- Harsuko. (2011). *Mendongkrak Motivasi dan Kinerja: Pendekatan Pemberdayaan SDM*. UB Press: Malang.
- M. Mohd Rosli & Rosman Mahmood (2013). Moderating Effects of Human Resource Management Practices and Entrepreneur-Pelatihan on Innovation and SmallMedium Firm Performance. *Journal of Management and Strategy* Vol. 4 no. 2 p. 60 – 69
- Mangkunegara, A.A. Anwar Prabu. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Ming-Chu Yu (2013). The Influence of HighPerformance Human Resource Practices on Entrepreneurial Performance: The Perspective of Entrepreneurial Theory. *The International Journal of Organizational Innovation* Vol 6 Num 1, p. 18 - 42.
- Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan Undang-Undang No. 20 tahun 2008.
- Reeg, C. (2013). Micro, small and medium enterprise upgrading in India: Learning form success cases. *Studies* 78. Bonn: DIE
- Sehabudin, U., Amiruddin S., Warcito. (2015). Faktor-Faktor Penumbuh Usaha Mikro-Kecil (UMK) Di Wilayah Kota Dan Kabupaten Bogor. *Journal of Management and Business Review* 13 (1). *PPM School of Management*. Jakarta.

Wahyudiati, D., & Isroah. (2018). Pengaruh Aspek Keuangan Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Terhadap Kinerja Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)

Di Desa Kasongan. *Profita: Kajian Ilmu Akuntansi*, 6(2), 1–11. Retrieved from <http://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/profita/article/view/13761>.